BAB IV
ANALISIS PENDAPAT SYAMSUDIN MUHAMMAD BIN
ABDULLAH AL-ZARKASY TENTANG *Kafa'ah* SEBAGAI
SYARAT SAH PERNIKAHAN

A. Analisis Pendapat Syamsudin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasy Tentang *Kafa'ah* Sebagai Syarat Sah Pernikahan.

seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa Imam al-Zarkasyi menganggap *kafa'ah* sebagai syarat sahnya nikah. Pendapat Imam al-Zarkasyi menganggap *kafa'ah* syarat sahnya nikah itu meliputi agama, dan nasab. Apabila salah satu syarat *kafa'ah* tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya batal atau tidak sah.

Imam al-Zarkasyi menuangkan pendapatnya tersebut di dalam kitabnya yang berjudul *sarh al-Zarkasyi*

وإذا زوجت من غير كفو فالنكاح باطل الكفاءة شرط لصحة النكاح ، على المنصوص والمشهور¹

Artinya: apabila seorang melakukan pernikahan dengan tidak adanya sebuah kesetaraan di antara suami dan istri (*kafa'ah*) maka nikahnya dianggap batal atau tidak sah. Karena menurutnya *kafa'ah* adalah merupakan sebuah syarat sahnya nikah. Dan hal ini adalah pendapat yang *mansus* (mendekati terhadap pemahaman nash) dan *masyhur* (pendapat yang telah mashur dikalangan ulama)

Pada redaksi di atas Imam al-Zarkasyi menyebutkan dengan jelas bahwa *kafa'ah* tidak lagi menjadi syarat *luzum* dalam suatu pernikahan akan tetapi menjadi syarat sah dalam suatu pernikahan, itu artinya apabila ada salah satu syarat *kafa'ah* yang tidak terpenuhi maka nikahnya batal atau tidak sah, sementara *jumhur* ulama' berpendapat bahwa *kafa'ah* hanya dijadikan sebagai syarat *luzum* dalam suatu pernikahan, artinya bahwa nikah tanpa adanya *kafa'ah* itu tetap sah dengan catatan bisa *difasakh* (dibatalkan) apabila pihak wanita itu menolak pernikahan tersebut.

¹ Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, "*Syarh al-Zarkasyi*", Vol: I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 59.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Muqni'* yang mengatakan, apabila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki akan tetapi laki-laki tersebut tidak se-*kufu*, meskipun perempuan dan walinya tersebut ridla atas pernikahan tadi, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah. Pendapat ini bisa dilihat seperti di bawah ini.

فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح.²

Artinya: apabila seorang perempuan dan wali ridla dinikahi dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahannya dianggap tidak sah.

Keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah di atas memperkuat keterangan Imam al-Zarkasyi, Imam Ibnu Qudamah mempertegas pernyataan Imam al-Zarkasyi yang berpendapat seorang yang menikah dengan orang yang tidak sekufunya maka pernikahannya dianggap batal atau tidak sah. Hal ini dikarenakan sekufu menurutnya adalah sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi sebelum melaksanakan pernikahan, maka dengan itu apabila syarat tersebut tertinggal maka pernikahannya dianggap tidak sah.

Menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muqni* di atas, sekalipun adanya seorang perempuan atau wali tersebut ridla menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahannya tersebut tetap dihukumi batal atau tidak sah.

Selain pendapat di atas tersebut, ada pendapat ulama lain yang menjadikan *kafa'ah* sebagai syarat sahnya dalam sebuah pernikahan, dan di antara yang berpendapat demikian di antaranya ialah Sufyan dan Imam Ahmad sebagaimana pendapat tersebut telah dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah sebagaimana di bawah ini.

² Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Muqni*, Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiah, 2000, hlm. 306.

إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما وهذا قول سفیان وقال أحمد في الرجل يشرب ما هو بكفء لها يفرق بينهما وقال لو كان المتزوج حائكا فرقت بينهما، لقول عمر رضي الله عنه لا تمنع فزوج دوات الاحساب إلا من الاكفاء (رواه الحلال بإسنادها)³

Artinya: apabila seorang *maula* (orang merdeka hanya saja tadinya seorang budak) menikah dengan orang Arab merdeka, maka keduanya harus dipisahkan dari pernikahannya. Imam Ahmad berkomentar mengenai permasalahan seorang laki-laki yang meminum minuman keras, maka orang tersebut tidak sekufu dengan seorang yang tidak meminum minuman keras, bahkan ia berkata: sekalipun ketidaksetaraan dalam permasalahan profesi seperti tukang tenun.

Pendapat serupa juga telah diungkapkan oleh Salman dalam sebuah riwayat yang telah diceritakan oleh Abi Ishaq al-Hamadani, dan pendapat tersebut telah dikutip pula oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwasannya Salman dan Jarir pernah berpergian bersama, lalu keduanya melaksanakan shalat, lalu Jarir berkata kepada Salman untuk mengImami shalat tersebut, lalu Salman berkata, engkau yang lebih pantas untuk mengImami, karena engkau adalah bangsa Arab yang tidak boleh di Imami oleh selainnya, dan tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuan kalian kecuali dengan yang sebangsanya, karena sebuah pernikahan tanpa adanya *kafa'ah* itu seperti halnya orang lain yang bukan wali menikahkan seorang perempuan tanpa seizinnya, maka dengan itu pernikahannya tidak sah.⁴

Kafa'ah yang dipertimbangkan dalam suatu pernikahan hanya sebatas tentang ketaatan beragama dan kededukannya saja. Adanya kesetaraan yang diharuskan dalam ketaatan beragama antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah karena merujuk kepada salah satu ayat al-Qur'an Surat al-Sajdah Ayat 18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

³ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mugni*, Vol. VII, Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiah, t.th, hlm. 371.

⁴ *Ibid*, hlm. 371-372.

Artinya : “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Tentu mereka tidak sama”.⁵

Pada ayat di atas secara tekstual tidak menjelaskan tentang seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus setara, hanya saja pada ayat di atas bisa diambil kephahaman bahwa sebenarnya Allah SWT berfirman menyindir tentang kedudukan seorang laki-laki yang taat beriman dengan seorang laki-laki *fasiq* (kerap melakukan perbuatan dosa). Tentu saja jawabannya adalah tidak sama. Meskipun yang dicontohkan pada ayat di atas adalah seorang laki-laki beriman dengan seorang laki-laki *fasiq*, tapi permasalahan di atas bisa dianalogikan antara seorang laki-laki yang ta'at atau tidak ta'at dengan seorang perempuan ta'at atau tidak ta'at.

Maka dengan demikian, hukum ketidaksetaraan antara seorang laki-laki menuntut ketidaksetaraan dengan seorang perempuan atau sebaliknya, hal ini menurut al-Zarkasyi sesuai dengan sesuatu yang telah diriwayatkan oleh al-Qadli dan selainnya dan teman-temannya al-Zarkasyi. Karena menurutnya seorang *fasiq* adalah salah satu orang yang ditolak dalam pemberian kesaksian dan dalam memberikan riwayatnya, ia tidak dipercaya oleh masyarakat dan dicela oleh Allah dan makhluknya, maka dengan itu seorang *fasiq* tidak *sekufu* dengan seorang *afifah* (orang perempuan yang menjaga kehormatannya).

Hukum tidak boleh menikah seorang laki-laki *fasiq* dengan seorang perempuan *afifah* itu di antaranya juga ditinjau dari perbuatan seperti melakukan perbuatan maksiat yang tampak oleh mata atau perbuatan maksiat lainnya yang tidak tampak oleh mata seperti dengki mengharapkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain agar lenyap atau musnah, hasud memprovokasi, iri dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dll.⁶

Adapun *kafa'ah* dalam permasalahan kedudukan, Imam al-Zarkasyi meninjau terhadap salah satu riwayat perkataan sahabat Umar RA seperti dibawah ini.

⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 543.

⁶ Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Syarh al-Zarkasyi*, hlm. 72.

لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء.⁷

Artinya : “saya sangat melarang kehormatannya seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dinikahkan kecuali terhadap orang yang sekufu”

Riwayat di atas sangat jelas sekali bahwa sahabat Umar RA sangat melarang seorang perempuan yang mempunyai kedudukan menikah terkecuali dengan seorang yang sekufunya. Secara tekstual larangan tersebut bisa saja bersifat suatu keharusan (wajib) atau hanya sebagai anjuran (sunah), akan tetapi tampaknya Imam al-Zarkasyi memahami larangan tersebut adalah wajib, maka dengan itu Imam al-Zarkasyi tidak memperbolehkan seorang perempuan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu.

Termasuk dalam kedudukan ialah tentang nasab, keturunan, golongan, qabilah, suku dan lain-lain, maka dengan itu seorang yang berkebangsaan Arab tidak boleh menikah dengan seorang yang bukan berkebangsaan Arab, seorang yang berkebangsaan Arab setara dengan orang yang berkebangsaan Arab lainnya, dan orang yang bukan berkebangsaan Arab setara dengan seorang yang bukan berkebangsaan Arab lainnya,

Hal ini karena Nabi Muhammad SAW pernah menikahkan anak dua anak perempuannya dengan sahabat Usman RA dan sahabat Abi ‘Ash RA dan keduanya merupakan dari qabilah *bani Abd Syams* dan Nabi pernah menikahkan Sahabat Usamah dengan Fatimah binti Qaisy yang mana ia (Fatimah binti Qaisy) merupakan dari qabilah Quraish.⁸

Selain itu Nabi Muhammad SAW pernah menikahkan putrinya Umi Kulsum dengan sahabat Ali bin Abi Thalib RA, maka dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang berkebangsaan Arab dengan orang yang berkebangsaan Arab lainnya adalah mempunyai kedudukan yang sama (*rutbah al-wahidah*)

⁷ *Ibid*, hlm. 60.

⁸ *Ibid*, hlm. 62-63.

Imam al-Zarkasyi dalam menanggapi riwayat-riwayat lainnya, seperti orang Arab suku Quraisy tidak boleh menikah melainkan dengan orang Arab suku Quraisy, dan orang Arab suku bani Hasyim tidak boleh menikah melainkan dengan orang Arab suku bani Haasyim dan riwayat-riwayat lain itu tampaknya Imam al-Zarkasyi memahami bahwa larangan tersebut bukan merupakan suatu larangan yang sifatnya mewajibkan, melainkan larangan tersebut hanya sifatnya anjuran, karena Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menikahkan orang Arab yang sukunya berbeda seperti di atas tadi.

Riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa bani Quraish tidak diperbolehkan menikah melainkan dengan bani Quraisy dan bani Hasyim tidak diperbolehkan menikah melainkan dengan bani Hasyim dan riwayat-riwayat lainnya yang sama itu telah ditentang oleh Abu Abbas, karena menurutnya larangan tersebut sebenarnya sama sekali tidak ada suatu *qarinah* (indikasi) yang mencegahnya, akan tetapi sebenarnya ada indikasi lain yang memperbolehkan suku satu menikah dengan suku lainnya yang berbeda sebagaimana riwayat yang telah diceritakan di atas.

Menurut Abu Abbas sebagaimana telah dikutip oleh al-Zarkasyi, sebenarnya tidak satupun riwayat dari Imam Ahmad yang menunjukkan pemahaman orang-orang Arab suku Quraisy tidak boleh menikah melainkan dengan orang-orang Arab suku Quraisy, dan orang Arab suku bani Hasyim tidak boleh menikah melainkan dengan orang Arab suku bani Haasyim, hanya saja pendapat yang telah dinash dari riwayatnya Imam Ahmad dari *jama'ah* (segolongan ulama) bahwa sebenarnya perkataannya adalah orang suku Quraisy dengan suku Quraisy lainnya adalah sekufu, bukan berarti nanti suku Qurais tidak diperbolehkan menikah terkecuali dengan suku Quraisy lainnya.⁹

Apa yang telah disampaikan oleh Abi Abbas di atas mendapatkan dukungan dari Ibnu Abi Musa, menurutnya orang suku Quraisy setara dengan suku Quraisy lainnya, dan orang yang berkebangsaan Arab setara dengan orang yang berkebangsaan Arab lainnya. Ibnu Abbas berpendapat

⁹ *Ibid.* Hlm. 74.

sebagaimana telah dikutip oleh al-Zarkasyi, yakni seseorang yang mengatakan “orang Bani Hasyim tidak diperbolehkan menikah melinkan dengan Bani Hasyim” itu menyimpang (*mariq*) dari ajaran Islam itu sendiri, Karena pada dasarnya sudah jelas Nabi Muhammad SAW telah menikahkan orang Arab suku satu dengan orang Arab suku lainnya seperti riwayat yang telah diceritakan di atas tadi, dan ini merupakan suatu *isbat* (ketetapan) sunnah yang ceritanya dianggap (*khofi*) samar. .¹⁰

Maka sebenarnya riwayat yang mengatakan tidak memperbolehkan orang suku Quraisy menikah melainkan dengan suku Quraisy itu tidak boleh diceritakan dalam madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, karena secara kenyataannya tidaklah demikian. Hal serupa (ketidak benaraan riwayat yang mengatakan tidak diperbolehkan orang suku Quraisy menikah melainkan dengan suku Quraisy lainnya) juga telah diungkapkan dan dishohihkan oleh Ibnu Aqil

Selain permasalahan tentang wajib adanya sekufu dalam kedudukan yakni tentang hal nasab dan suku atau qabilah seperti yang telah dipaparkan di atas, kedudukan dalam agama yang dianut oleh kedua orang tuanya juga harus dipertimbangkan secara ketat. Seorang yang kedua orang tuanya beragama Islam tidak sekufu dengan orang yang kedua orangtuanya tidak beragama Islam, orang yang salah satu dari kedua orangtuanya beragama Islam tidak sekufu dengan orang yang kedua orang tuanya islam, dan orang yang orang yang kedua orang tuanya Islam tidak sekufu dengan orang yang salah satu dari kedua orang tuanya Islam.¹¹

Menurut Abi Hanifah sebagaimana pendapat tersebut telah dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa wajibnya sekufu dalam permasalahan agama yang dianut oleh kedua orang tua sebagaimana telah dijelaskan diatas itu tidak benar adanya dan pendapat tersebut tidak shohih, karena menurutnya mayoritas dari kalangan Sahabat orang tuanya tidak beragama Islam, akan tetapi dalam relaitanya para Sahabat sekufu dengan para tabi'in yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 75.

mayoritas kedua orang tuanya beragama Islam. Maka dengan itu tidak diperbolehkan sahabat tidak sekufu dengan para tabi'in, karena pada hakikatnya sahabat merupakan utama-utama umatnya Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan orang yang dihasilkan dari hubungan badan haram (zina) itu tidak sekufu dengan orang yang dihasilkan dari hubungan badan yang halal (jima'), karena seorang yang dihasilkan dari hubungan badan yang haram itu pada hakikatnya tidak mempunyai wali yang sah, dan ketika ia akan nikahpun walinya tidak diperbolehkan orang laki-laki yang berzina tersebut malainkan walinya harus hakim.¹²

Dari uraian di atas, dengan melihat dalil yang digunakan Imam al-Zarkasyi menurut hemat penulis, bahwa Imam al-Zarkasyi dalam menentukan *kafa'ah* sebagai syarat sahnya nikah kurang begitu kuat, karena istinbath hukum yang dipakai Imam al-Zarkasyi adalah Hadisnya masih terlalu umum dan terjadi *ikhtilaf* dikalangan ulama dalam mengartikan larangan tersebut, selain itu Hadis yang diriwayatkan ada beberapa perawinya yang kurang dipercaya.

Bila ditarik kesimpulan antara pendapat Imam al-Zarkasyi dengan jumhur ulama (Imam madzhab) terdapat persamaan dan perbedaan, dalam menentukan kriteria *kafa'ah* yaitu agama dan nasab mereka sama-sama menggunakannya, bahkan mereka sepakat bahwa agama yang dimaksud bukan berarti orang Islam menikah dengan orang Islam, akan tetapi tingkat kualitas keberagamaanya, dalam artian permasalahan keta'atan dalam melaksanakan perintah agama-Nya, yaitu orang yang fasiq tidak boleh menikah dengan orang yang ta'at beragama (*afifah*). Sementara dalam masalah perbedaan jelas-jelas terjadi sebab Imam al-Zarkasyi menganggap *kafa'ah* sebagai syarat sah dalam suatu pernikahan artinya apabila salah satu syarat *kafa'ah* tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah, sedangkan Jumhur ulama menganggap *kafa'ah* hanya sebagai syarat *luzum* dalam suatu pernikahan artinya Jika seorang perempuan menikah dengan

¹² *Ibid.*

seorang laki-laki yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka. Sebab, *kafa'ah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja membatalkan (*fasakh*) pernikahan tersebut.

B. Analisis Istinbat Hukum Syamsudin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasy Tentang *Kafa'ah* Sebagai Syarat Sah pernikahan.

Sebagai seorang Imam yang mempunyai kemampuan dan kecakapan intelektualitas yang tinggi juga sebagai orang yang menyandang gelar *Syamsuddin* (laksana matahari dalam memberikan pencerahan dalam hal agama) tidak akan sembarangan dalam menetapkan sebuah produk hukum yang ia keluarkan tanpa adanya sebuah *istinbat* terhadap sumber aslinya (al-Qur'an dan al-sunah).

Hanya saja al-Qur'an dan al-sunah masih sangat membutuhkan pemahaman dan penggalian secara optimal agar isi kandungan hukumnya dapat diterapkan bagi kemaslahatan umat. Cara untuk menggali dan mengeluarkan isi kandungan yang ada dalam kedua sumber tersebut dinamakan *ijtihad*. *Ijtihad* sangat dibutuhkan pada setiap *istinbat* hukum dalil nash, sekalipun dalil nash tersebut bersifat *qat'i* yang oleh para *usuliyun* sudah disepakati tidak menjadi wilayah untuk diijtihadi lagi.

Ijtihad merupakan salah satu cara dalam pengambilan hukum Islam. *Ijtihad* merupakan media yang sangat efektif dalam penggalian sumber hukum Islam untuk menjawab segala problematika baru yang muncul di masyarakat yang belum secara eksplisit oleh nash, baik yang ada dalam al-Qur'an maupun al-sunah. *Ijtihad* yang dimaksud adalah melakukan rekonstruksi atau merumuskan kembali terhadap nash/teks baik al-qur'an maupun al-sunah.¹³

¹³Rokhmadi, *Rekonstruksi ijtihad Dalam Ilmu Usul al-Fiqh*, Jurnal al-Ahkam Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Waisongo, 2012, hlm. 162.

Menurut *jumhur al-ulama' usul al-fiqh (usuliyun)* bahwa melakukan *ijtihad* terhadap kedua sumber hukum tersebut (al-qur'an dan al-sunah) diperbolehkan selama nash atau teks tersebut masih bersifat *dzani al-dalalah*. Sedangkan jika nash atau teks tersebut sudah bersifat *qat'i al-dalalah*, maka tidak ada peluang untuk berijtihad (*la masaga li al-ijthad fi ma fihi nas sarih qat'i*) atau istilah lain yang semakna dengannya. Kaidah tersebut menyatakan bahwa ketidakbolehan melakukan ijtihad dalam nash atau teks yang bersifat *qat'i al-dalalah* adalah merupakan ijma' ulama *usuliyun*.

Ulama dalam menentukan sebuah produk hukum fiqh tidak terlepas dari istinbat terhadap sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadist, apabila dari keduanya tidak ditemukan maka bisa beralih terhadap *ijma'* ulama (konsensus), dan apabila tidak ditemukan maka bisa beralih terhadap qiyas (silogisme). Hal ini sangat mungkin dan dianggap wajar sekali mengingat al-Qur'an dan Hadist redaksinya masih sangat global dan tidak berurutan secara pengelompokan sehingga sulit untuk dipahami, selain itu perkembangan manusia yang semakin maju dan pesat sesuai tuntutan zaman, tidak mungkin al-Qur'an dan Hadist akan selalu menjawab secara transparan terhadap permasalahan-permasalahan yang terus *up to date* tanpa menkontekstualkan dalam teks-teks yang ada.

Dalam upaya konstekstualisasi ulama terhadap nash-nash al-Qur'an dan Hadist, maka munculah beberapa ide dalam pemikiran dan penggalian hukum yang disebut dengan *manhaj* (metodologi), dengan metodologi inilah ulama punya sistematika *istinbath* dan kaidah-kaidah secara khusus yang kita kenal dengan ushul fiqh, dengan ushul fiqh ini ulama punya banyak motif dan variasi untuk membantu dalam memahami terhadap nash-nash tersebut. Maka lahirlah *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *u'rf*, *qaul al-sahabat*, *syar'u man qablana*, *shaz al-zara'i*, *fath al-zara'i* dan lain-lain.

Begitu juga dalam menetapkan hukum yang dilakukan oleh Imam Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasy mengenai hukum *kafa'ah* menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Imam al-Zarkasyi dalam menetapkan sebuah hukum dalam menjadikan *kafa'ah* sebagai syarat sahnya

nikah mengacu terhadap beberapa Hadist yang ada, meskipun dalam teks-teks Hadist tersebut tidak ada satupun yang secara jelas berbicara tentang *kafa'ah* syarat sahnya nikah, Hadist tersebut adalah:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو علي علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا محمد بن إسحاق بن حزيمة، ثنا علي بن حجر، ثنا بقیة، ثنا مبشر وأنا أبرأ من عهدته، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وعن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم: "لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجهن إلا الأكفاء ولا مهر دون عشرة دراهم"¹⁴

Artinya: Abu Abdullah al-Hafidz menceritakan kepada kami, ia dari abu Ali al-Husain bin Ali al-Hafidz, dari Muhammad bin Ishaq bin Hujaimah, dari Ali bin Hajar, dari Baqiyah, dari dari Mubasyar, dari Hujjaj bin bin Artho'ah dari 'Amr bin Dinar dari Jabir dari Atha' dari sahabat Jabir RA, ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda: wanita-wanita tidak diperbolehkan dinikahkan terkecuali oleh wali-walinya, dan janganlah menikahkan wanita-wanita tersebut terkecuali terhadap orang yang sekufunya, dan tidak ada mahar yang lebih rendah dari sepuluh dirham.

Hadist di atas memiliki tiga poin isi kandungan hukum yakni tidak diperbolehkan menikahkan wanita-wanita kecuali oleh walinya, dan tidak boleh menikahkan wanita-wanita melainkan dengan orang yang sekufu, dan yang terakhir yaitu tidak ada mahar dibawahnya sepuluh dirham. Permasalahan tiga larangan hukum di atas dalam Hadist tersebut memiliki substansi yang sama, yakni tidak diperbolehkan untuk melakukannya, dalam artian apabila melakukan dan tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Hadist di atas maka pekerjaan tersebut tidak dianggap sah.

Permasalahan pertama yaitu tidak diperbolehkan menikahkan seorang perempuan terkecuali oleh walinya, hukum tidak boleh tersebut seandainya perempuan tersebut dinikahkan oleh orang yang bukan menjadi walinya, maka dapat dipastikan pernikahan tersebut tidak sah, begitu dalam poin yang kedua yaitu tidak diperbolehkan menikahkan seorang perempuan terkecuali

¹⁴ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Vol. VII, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994, hlm. 215.

dengan orang yang sekufu, yakni apabila seorang perempuan menikah dengan seorang yang tidak sekufu maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, dan untuk poin ketiga yaitu tidak ada mahar sebowahnya sepuluh dirham, yakni apabila seorang menikah dan ternyata mahar yang di berikan tersebut kurang dari sepuluh dirham maka pernikahnya tidak sah.

Meskipun demikian, adanya larangan-larangan yang terdapat dalam Hadist di atas kalau kita telisik dan analisa lebih dalam bahwa sebenarnya larangan yang ada dalam Hadist tersebut sifatnya masih umum, karena dalam redaksinya teks dalam larangan tersebut memakai sebuah kata kerja bersifat akan datang yang dimasuki *la nahi*, tidak memakai teks *hurrima*, *harrama* dan sebagainya.

Maka oleh karena itu banyak di antara ulama yang mempunyai kephahaman yang berbeda mengenai permasalahan tiga poin diatas, sebagian ulama ada yang memahami sebenarnya pada poin pertama yakni larangan untuk menikahkan seorang perempuan terkecuali oleh walinya, dan ini kebanyakan dianut oleh kalangan Syafi'iyah, dan sebagian lagi yang memahami bahwa sebenarnya larangan pada poin pertama adalah hanya sebatas anjuran saja, karena kita tahu bahwa ada sebagian dikalangan ulama yang berpendapat seorang perempuan diperbolehkan menikah meskipun tidak dengan walinya.

Pada poin kedua, ada sebagian ulama yang memahami bahwa sebenarnya larangan menikahkan seorang perempuan terkecuali dengan orang yang sekufu yang terdapat pada Hadist di atas tersebut ada yang memahaminya hanya sebatas anjuran saja, dalam artian sebaiknya janganlah menikahkan seorang perempuan terkecuali dengan orang yang sekufu, dan pendapat ini banyak diikuti oleh kalangan Syafi'iyah, golongan Syafi'iyah menjadikan *kafa'ah* hanya sebatas syarat *luzum* nikah, bukan syarat sahnya nikah, dan sebagian ulama lagi yang memahami pada poin kedua tersebut, bahwa sebenarnya larangan tersebut bukan lagi bersifat anjuran, akan tetapi larang yang tuntutananya bersifat sangat atau mendesak, maka oleh karena itu mereka menjadikan *kafa'ah* sebagai syarat sahnya nikah, bukan lagi syarat

luzum, dan diantaranya pendapat ini diikuti oleh Imam al-Al-Zarkasyi salah satu pengikutnya Imam Ibnu Hanbal.

Pada poin ketiga, sebagian ulama memahami “*la mahra*” adalah tidak ada mahar dianggap sempurna atau baik jika mahar tersebut dibawah sepuluh dirham, dalam artian apabila seorang menikah dan mahar yang diberikan tersebut kurang dari sepuluh dirham maka pernikahannya masih dianggap sah akan tetapi adanya pemberian mahar tersebut tidak dianggap baik, pendapat ini kebanyakan dianut oleh kalangan Syafi’iyah. Ada sebagian ulama lagi yang berpendapat bahwa sebenarnya dalam lafal “*la mahra*” yang ada pada Hadist di atas ialah tidak ada mahar itu dianggap sah jika kurang dari sepuluh dirham, maka apabila seorang menikah dan mahar yang diberikan kurang dari sepuluh dirham maka pernikahannya dianggap tidak sah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebetulnya dalam penggalian hukum yang dilakukan oleh Imam al-Zarkasyi dalam permasalahan tidak diperbolehkan seorang perempuan menikah terkecuali dengan orang yang sekufu atau Imam al-Zarkasyi menjadikan *kafa’ah* sebagai salah satu syarat sahnya nikah yang beristinbat dengan Hadist diatas itu sebenarnya Hadist tersebut sifatnya masih umum dan dapat menelurkan pemahaman-pemahaman yang berbeda.

Selain sebagaimana Hadist di atas yang dijadikan acuan oleh Imam al-Zarkasyi dalam melakukan istinbath mengenai *kafa’ah* dijadikan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan, ada beberapa Hadist lain yang isi dari kandungannya hampir sama, akan tetapi mempunyai substansi yang saama. Di antara Hadist tersebut sebagaimana di bawah ini.

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدن، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أحمد بن علي، وجعفر بن محمد الفريابي فرقهما، قالا : ثنا فتية بن سعيد، ثنا عبدالله بن وهب، عن سعيد بن عبدالله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلي الله

عليه وسلم قال له : يا علي ثلاثة لا تؤخرها : الصلاة إذ أتت، والجنائز إذ حضر، والأيم إذا وجدت كفؤا.¹⁵

Artinya : "Ali bin Ahmad bin 'Abdan menceritakan kepada kami, Ahmad bin 'Abid al-Shifar menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali dan Ja'far bin Muhammad al-Faryabi menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb dari Sa'id bin Abdullah al-Jahni, dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasullullah Muhammad SAW telah bersabda terhadap Ali: wahai Ali janganlah engkau mengakhirkan tiga sesuatu, yaitu melakukan shalat manakala telah datang waktunya, dan menshalatkan Janazah manakala telah Hadir, dan menikahkan orang yang belum mempunyai pasangan manakala telah ditemukan orang yang sekufu".

Dalam Hadist di atas memiliki tiga poin permasalahan hukum, yaitu sebuah larangan untuk mengakhirkan sesuatu apabila sesuatu tersebut telah datang waktunya. Pertama, apabila telah datang waktu shalat maka janganlah engkau mengakhirkan, kedua apabila telah ada jenazah dan telah dimandikan maka janganlah engkau mengakhirkan untuk menshalatnya, ketiga, apabila telah ada orang yang sekufu di antara laki-laki dan perempuan, maka janganlah engkau mengakhirkan untuk menikahnya.

Dalam permasalahan ketiga, yakni jangan mengakhirkan atau menunda menikahkan seseorang perempuan atau laki-laki manakala telah ditemukan antara perempuan dan laki-laki tersebut orang yang sekufu, maka dapat dipahami bahwa keterkaitan permasalahan di atas yakni seseorang tidak boleh dinikahkan terkecuali dengan seorang yang *sekufu* dan janganlah engkau mengakhirkan seseorang yang belum mempunyai pasangan manakala telah ditemukan orang yang *sekufu* adalah sama sama tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang tidak sekufu, karena sebetulnya pada permasalahan ketiga yang terdapat pada Hadist di atas mempunyai makna tersirat atau *mafhum mukhalafah* yaitu janganlah sekali-kali menikahkan seseorang terkecuali dengan orang yang *sekufu*, meskipun ada sebagian ulama yang memahami

¹⁵ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Vol. VII, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994, hlm. 215.

larangan yang terdapat pada Hadist di atas tersebut hanya sebatas anjuran bukan sesuatu yang sifatnya suatu keharusan.

Hadist yang mengatakan janganlah mengakhirkan atau menunda untuk menikahkan anantara seorang laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai pasangan tersebut dapat ditemukan dalam kitab *al-Sunan al-Shugra*. Dalam kitab *al-Jauhari* yang telah diungkapkan orang yang mengarang kitab mustadrak sebagaimana telah dikutip oleh Imam Muhammad Abdul Qadir Atha' sanad yang terdapat dalam Hadist tersebut *Shohih*.¹⁶

Shahih secara bahasa ialah sesuatu yang tidak memiliki cacad sama sekali, sedangkan *Shahih* secara *istilah* ialah Hadist yang sanadnya *mutasil* sampai Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh orang 'adil, *tsiqah*, serta kekuatan hafalan dan penalaran yang dimiliki oleh orang yang meriwayatkan tersebut sangat luar biasa. Adapun hukum Hadist *Shahih* dalam dijadikan landasan dalil dan pengamalan atau dalam memproduksi suatu hukum, Hadist *Shahih* merupakan Hadist yang dianggap paling kuat dan biasa dijadikan standar dalam beristinbat hukum.¹⁷

Selain itu, ada salah satu Hadist yang dapat memperkuat dua Hadist di atas, hanya saja memiliki matan dan rawi yang berbeda, Hadist tersebut sebagaimana di bawah ini.

أخبرنا أبو عبدالحافظ، ثنا علي بن عيسى، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا عبد الله بن سعيد الكندي، ثنا الحارث بن عمران الجعفري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عليه وسلم : تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم.¹⁸

Artinya: Abu Abdullah al-Hafidz menceritakan kepada kami, Ali bin Isya menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Said al-Kunudi menceritakan kepada kami, Haris bin Imran al-Ja'fari menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah RA, ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda: engkau sekalian pilihlah

¹⁶ *Ibid*, hlm. 214

¹⁷ Sayid Muhammad bin 'Alawi bin Abbas al-Maliki, *al-Manhal al-Latif*, Malang: al-Shofwah, t.th, hlm. 61-62.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 214-215.

tempat untuk menyimpan benihmu (perempuan-perempuan), nikahilah mereka (perempuan) yang sekufu denganmu, maka nikahilah.

Sanad Hadist tersebut menurut pengarang kitab *mustadrak* dalam kitab *al-Jauhari* sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad bin Abdul Qadir Atha' adalah *Shahih*. Pada Hadist di atas sebenarnya tidak mengungkapkan secara transparan bahwa *kafa'ah* sebagai salah satu syarat sahnya nikah, hanya saja pada Hadist tersebut terdapat kata perintah *wankihu al-akfa'* adalah sebuah bentuk perintah yang sifatnya masih umum, yakni Nabi Muhammad SAW memerintahkan menikah dengan orang yang sekufu, hanya saja kata perintah tersebut memiliki banyak kemungkinan seperti kata-kata perintah yang terdapat pada dua Hadist di atas. Kata perintah tersebut bisa saja bersifat tuntutan yang sangat (wajib) atau hanya sekedar tuntutan yang tidak sangat (anjuran). Untuk bisa memahami apakah kata perintah tersebut sebagai tuntutan yang sangat (wajib) atau hanya sekedar tuntutan yang biasa (anjuran) harus meninjau terhadap nash-nash lainnya.¹⁹

Dengan demikian bisa disimpulkan, apabila kata perintah tersebut dipahami sebagai suatu tuntutan yang amat sangat, maka bisa menghasilkan sebuah hukum bahwa *kafa'ah* merupakan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan, dan apabila kata perintah tersebut dipahami sebagai sesuatu tuntutan biasa, maka dapat menghasilkan sebuah hukum *kafa'ah* merupakan hanya sebagai syarat luzum dalam pernikahan.

Hadist yang hampir sama dalam matannya dengan salah satu Hadist di atas juga telah ditemukan dengan rawi yang berbeda, hanya saja rawi dalam Hadist ini ada yang menganggapnya tidak terpercaya atau lemah sehingga mengubah status Hadist yang diriwayatkan olehnya menjadi *Dla'if*, Hadist tersebut sebagaimana di bawah ini.

¹⁹ *Ibid*,

أخبرنا عن مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم.²⁰

Artinya: Mumbasyar bin Ubaid menceritakan kepada kami dari al-Hajjaj bin Artha'ah dari Atha dan 'Amr bin Dinar dari Jabir dari Abdullah RA ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda: janganlah kalian semua (wali) menikahkan para wanita terkecuali terhadap orang yang sekufu, dan janganlah mereka (wanita) dinikahkan keculi oleh walinya, dan tidak ada mahar seabawahnya sepuluh dirham.

Ali *rahimahullah* berkata: Mubasyar bin Ubaid merupakan salah satu orang yang ditinggalkan dalam periwayatan Hadistnya, dan Hadist yang diriwayatkan olehnya tidak dapat diikuti.

Selain beberapa Hadis di atas, ada juga salah satu Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam al-daruquthni dengan bentuk matan Hadis yang sama, hanya saja dalam beberapa perawinya yang berbeda. Hadis tersebut sebagaimana di bawah ini.

ثنا أحمد بن عيسى بن السكن البلدي، نا زكريا بن الحكم الدسغني، نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، نا مبشر بن عبيد، حدثني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم.²¹

Artinya: Ahmad bin Isa bin al-Sukaini al-baladi menceritakan kepada kami, Zakaria bin al-hakam al-Dzas'ani menceritakan kepada kami, Abu al-Mughirah Abdul Quddus bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Mubasyir bin Ubaid menceritakan kepada kami, al-Hajjaj bin arthah menceritakan kepadaku, dari Atha' bin Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: jangan menikahkan wanita keculi dengan yang sepadan, dan tidak ada yang menikahkan mereka keculi para wali, serta mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Vol. III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 541

Matan Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Daruqutnhi di atas tamapak sama dengan matan Hadsis yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi, hanya saja menurut sebagian ulama Hadis yang telah diriwayatkan oleh al-Baihaqi tersebut dianggap tidak kuat, karena salah satu perawinya yakni al-Hajjaj bin Artha'ah dianggap *Dla'if*, sedangkan Mubasyir bin Ubaid adalah perawi yang *matruk*, ia juga pernah dituduh telah melakukan pemalsuan Hadis oleh Ahmad.²²

Menurut Syaikhul Islam al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalani, sebagaimana pendapat tersebut telah dikutip oleh Nuruddin 'Itr, Hadis *matruk* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dituduh dusta dan Hadis itu tidak diketahui kecuali hanya dengan melalui jalannya, disamping itu ia menyalahi kaidah-kaidah yang telah maklum. Demikian pula Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dikenal pendusta dalam bicarannya meskipun ia tidak pernah terbukti dengan jelas melakukan kedustaan dalam meriwayatkan Hadsis Nabi Muhammad SAW.²³

²² *Ibid.*

²³ Nuruddin Itr, *Manahaj al-Naqd*, Penerjemah, Mujiyo, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, hlm. 64.